



# Analisis Penerapan PSBB di Masa Covid-19 dalam Perspektif Strukturasi

**Agussalim**

Universitas Paramadina, Indonesia

E-mail: [agsal46@gmail.com](mailto:agsal46@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01	<p>The Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Permenkes 9 of 2020 are Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Management of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) stipulated by the Minister of Health. As we know, the world is currently facing a crisis and an outbreak of the 2019 Corona Virus Disease Pandemic with the number of deaths and infection cases exceeding millions of people, which has a serious impact on various aspects of life. Unfortunately, until now there has been no treatment, the Covid-19 drug has appeared. Relevant authorities such as the ministry of health, disaster management agencies, as well as public health services such as hospitals have experienced "panic" in responding to and responding to a pandemic. Especially the wider community who do not have information, experience and knowledge about what, why and how of Covid-19. In general, the public hopes that there will be a policy related to Covid-19 that is responsive, fast, precise and transparent before, when it takes place, and future plans from the government regarding protocols for preventing and controlling the spread of the Covid-19 virus by taking into account the social scope from level to level. top to the lowest level in the social community environment. This research examines the governance and practice of health protocols or more commonly referred to in other words as PSBB covid-19 based on a review of relevant literature and content. The analysis is built based on the periodization and chronology of a number of important events since the announcement of the entry into force of the PSBB in Indonesia. This research focuses on the PSBB implementation model in every activity of the Indonesian people which is the reference for the central and regional governments in a structuration perspective.</p>
<b>Keywords:</b> <i>Implementation of PSBB; Covid-19; Structural.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01	<p>Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Permenkes 9 tahun 2020 merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui saat ini dunia tengah menghadapi krisis dan wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan jumlah kematian dan kasus infeksi yang melebihi jutaan orang sehingga memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan. Naasnya, sampai saat ini belum ada treatment, obat Covid-19 muncul. Otoritas terkait seperti kementerian kesehatan, badan penanggulangan bencana, juga layanan kesehatan publik seperti rumah sakit mengalami "kepanikan" dalam merespon dan mensikapi pandemi. Terlebih masyarakat luas yang tidak memiliki informasi, pengalaman dan pengetahuan tentang apa, mengapa dan bagaimana covid-19. Publik umumnya berharap pemerintah mengembangkan kebijakan Covid-19 yang cepat, akurat, tanggap, dan transparan sebelum, selama, dan setelah suatu kejadian. Kebijakan ini harus mencakup protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19 dengan memperhatikan ruang lingkup sosial dari tingkat tertinggi hingga terendah di lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan survei literatur dan konten terkait, penelitian ini menyelidiki tata kelola dan penerapan protokol kesehatan, atau PSBB covid-19 seperti yang lebih dikenal. Kajian tersebut didasarkan pada periodisasi dan kronologi sejumlah peristiwa penting yang terjadi setelah PSBB diumumkan berlaku di Indonesia. Penelitian ini terfokus pada model penerapan PSBB di setiap kegiatan masyarakat Indonesia yang menjadi rujukan pemerintah pusat dan daerah dalam perspektif strukturasi.</p>
<b>Kata kunci:</b> <i>Penerapan PSBB; Covid-19; Strukturasi.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Kasus pandemi Covid-19 tentu menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Dengan pening-

katan lonjakan kasus yang cepat dan kurangnya persiapan berbagai komponen kunci yang diperlukan untuk "melawan" virus corona

membuat publik semakin khawatir. Mengingat penyebarannya yang begitu luas, pemerintah harus bertindak cepat dan strategis. dengan menerapkan langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak COVID-19.

Sejak awal Maret 2020 saat kasus covid-19 di Indonesia masih terhitung satu-dua kejadian, pemberitaan di media elektronik, cetak maupun online masih didominasi oleh pemberitaan mengenai korban. Saat itu masih sedikit sekali informasi dan pemberitaan yang membahas analisis, kronologis penularan, penyebaran serta cara pencegahan virus dengan pendekatan saintifik yang utuh dan juga mencerahkan masyarakat. Di awal-awal pandemi, informasi tentang covid-19 masih didominasi oleh wacana sensasi dan mengesampingkan aspek edukasi. Dampaknya, beberapa minggu setelah kasus pertama, saat korban terpapar virus mencapai seratusan orang, media sosial dan layanan pesan pribadi seperti *whatsapp* dibanjiri informasi hoax, konspiratif dan wacana-wacana non-saintifik yang jauh dari rasionalitas. Di lapangan, informasi dan komunikasi menjadi chaos serta menimbulkan kepanikan secara menyeluruh di seluruh tanah air.

Dalam rangka menginformasikan kepada publik mengenai strategi yang telah dipilihnya untuk mengatasi COVID-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, Presiden Jokowi menggelar konferensi pers pada 31 Maret 2020. Presiden Jokowi dalam konferensi pers tersebut menyatakan bahwa Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipilih sebagai respons terhadap kedaruratan medis. Kebijakan antisipatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan yang membatasi kemampuan penduduk untuk melakukan aktivitas tertentu di komunitas yang diduga telah ditemukan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Presiden Jokowi saat jumpa pers menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan unik di daerahnya yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dan pihak swasta; jika mereka tidak atau menghalangi pelaksanaannya, mereka berisiko terkena hukuman pidana. Padahal, pemerintah pusat belum memberikan pengumuman apapun kepada masyarakat luas sejak kasus COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China. Dari sisi

otoritas daerah, terlihat lebih waspada dalam menangani kasus COVID-19. Hal ini menunjukkan masih kurangnya koordinasi dalam proses pengambilan kebijakan antara pusat dan daerah sehingga banyak peraturan yang tumpang tindih. Di tengah kekhawatiran kasus COVID -19 yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah kebijakan dalam menyikapi kasus COVID-19 ini dapat berjalan secara maksimal sebagai upaya penekanan dari melonjaknya penyebaran Covid-19.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awalnya dilakukan di Jakarta dan sekitarnya. Alasan undang-undang ini dibuat untuk menjalankan masa inkubasi total selama 14 hari (terhitung sejak masa PSBB pertama beroperasi). Pemerintah ingin mempercepat pemulihan wabah Covid-19 dengan aturan ini. Inti dari PSBB sebenarnya tidak jauh berbeda dengan permintaan pemerintah sebelumnya untuk pembatasan sosial (pemisahan sosial). Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah Hanya agar kasus positif virus corona semakin sedikit, pemilik rumah tidak boleh terlalu sering keluar rumah. PSBB hanya memberikan verifikasi. Kegiatan keagamaan dibatasi dan semua tempat ibadah ditutup. Pelayanan angkutan umum hanya ada beberapa jam saja, dari pukul 06.00 hingga 08.00 WIB. Tempat kerja dan sekolah ditutup.

Namun, tidak semua lini industri libur setelah itu. Kesehatan, pangan, energi, komunikasi, distribusi produk, keuangan dan perbankan, kebutuhan sehari-hari, dan industri kritis adalah delapan sektor yang harus terus berfungsi. Sayangnya, ada beberapa masalah dengan kebijakan ini. Para pelaku usaha menilai PSBB bisa mematikan sejumlah sektor. Sejak pandemi virus corona, permintaan lesu di beberapa industri. Industri yang paling terkena dampak negatif adalah real estat, transportasi umum, acara, dan pariwisata.

Bukan tanpa alasan, pemerintah memilih PSSB sebagai wacana awal dalam menghadapi proses untuk penekanan dalam memerangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dengan tujuan agar perjuangan PSBB dapat dilakukan dengan tegas dan sukses, DKI Jakarta dan sekitarnya serta kabupaten/kota lain di Indonesia akan menjadi acuan awal penerapan

PSBB. Tidak sulit menjadikan DKI Jakarta sebagai model penerapan PSBB untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Menyelamatkan penduduk Jakarta, Indonesia, dan seluruh dunia adalah tujuan utama. Untuk menjaga diri, keluarga, tetangga, rekan kerja, dan seluruh penduduk Indonesia, seseorang harus disiplin dan sadar akan lingkungannya.

Maka berdasarkan dasar persoalan tersebut diatas, dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan penerapan PSBB di Indonesia. Apa penyebab peraturan PSSB tidak berfungsi dengan baik? Seberapa baik isu penyebaran Covid-19 berfungsi di bawah perubahan struktural dan norma sosial saat ini? Sejauh mana penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia diperlambat oleh penyesuaian struktural kebijakan Kemenkes dan Kemensos yang dirancang untuk menghindari kepadatan di masing-masing daerah? Sehingga peneliti melihat perlu adanya untuk melakukan sebuah kajian khusus terkait permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan dalam perseptif strukturalisasi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Alat analisis utama dalam skenario ini adalah pendekatan "Agen-Struktur" Anthony Giddens, yang membantu menjelaskan masalah ini. Metode penelitian studi kasus digunakan untuk memahami dan menjelaskan mengapa proses penerapan PSBB di Indonesia tidak berjalan sesuai rencana. Studi kasus adalah pendekatan penelitian, menurut Cresswell (1998), dimana peneliti menggali kejadian tertentu pada waktu dan aktivitas tertentu, mengumpulkan informasi mendalam, dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data selama jangka waktu yang telah ditentukan. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk menggambarkan metode PSSSB yang digunakan di Indonesia, yang mencegah PSSSB untuk mengurangi penyebaran Covid-19. DKI Jakarta dipilih sebagai lokus penelitian untuk memahami dan merekonstruksi bagaimana relasi antar aktor, agensi, dan struktur sehingga menciptakan realitas sosial masyarakat yang terdampak akibat penerapan PSBB secara langsung.

Fokus dari penelitian adalah implementasi kebijakan dalam hal proses berjalannya penerapan PSBB secara maksimal dan diikuti oleh semua masyarakat yang terdapat di wilayahnya, yang mana implementasinya kemudian akan

dikaji melalui dimensi-dimensi signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Selain itu, fokus penelitian juga mengarah kepada kesadaran yang ada dalam diri masyarakat setelah menerima kebijakan pola pemberlakuan aturan PSBB. Kesadaran ini akan dilihat melalui konsep kesadaran dan rutinisasi yang mereka lakukan setelah diberlakukan PSBB di seluruh Indonesia.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Teori Strukturalisasi**

Menurut teori strukturalisasi, keputusan selalu dibuat berdasarkan faktor struktural, dan setiap tindakan berdampak pada jenis kondisi yang dihasilkannya. Dalam teori strukturalisasi, agen didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang dapat berpartisipasi atau tidak dalam suatu peristiwa dan mempengaruhi bagaimana peristiwa itu terungkap. Hipotesis strukturalisasi, disisi lain, menjelaskan metode dimana struktur sosial dibuat, direplikasi, dan dimodifikasi didalam dan melalui praktik. Akibatnya, struktur sosial bersifat ganda, artinya diciptakan oleh manusia dan juga media aksi sosial lainnya. Kemiskinan dapat dipahami sebagai peluang yang dapat dimodifikasi melalui produksi atau reproduksi oleh agen dengan menghilangkan dualitas antara tindakan dan struktur agen berkat gagasan ini.

Seperti diketahui bahwa interaksi antara manusia dan sistem sosial adalah masalah sosiologis yang signifikan. Ketidaksepakatan ini berawal dari persoalan bagaimana struktur mempengaruhi apa yang dilakukan orang, bagaimana struktur dibuat, dan pembatasan apa yang diberlakukan, termasuk pembatasan bagaimana individu atau aktor dapat bertindak secara independen dalam menghadapi rintangan struktural. Saat memeriksa masalah ini, beberapa sosiolog berpendapat bahwa meskipun struktur tidak memiliki dampak yang signifikan, bagaimana orang membentuk lingkungannya adalah yang paling penting. Sudut pandang lain berpendapat bahwa sosiologi harus fokus pada struktur sosial karena itu membentuk karakter individu atau aktor, membuat karakter agensi menjadi tidak relevan.

Selain itu, Giddens menggunakan gagasan "dualitas struktur" untuk dapat mencoba mendamaikan perbedaan pendapat antara agen dan struktur. Dia berpendapat bahwa struktur adalah medium dan hasil dari tindakan berulang yang dilakukan oleh struktur.

Dalam konteks ini, Giddens menggarisbawahi seberapa banyak informasi aktor bergantung pada pengetahuan sebelumnya dan taktik pencapaian tujuan. Pada kenyataannya, praktik sosial yang menjangkau ruang dan waktu dan tindakan manusia yang berulang dan reflektif untuk memberi orang atau aktor kemampuan untuk bertindak sebagai agen atau mempengaruhi perubahan daripada struktur dan agensi adalah yang terpenting. Giddens menyebut praktik sosial dan tindakan manusia ini "rekursif" (Giddens, 2009).

Menurut teori strukturasi, aktivitas sosial yang dilakukan secara terus-menerus (rekursif), terlepas dari ruang atau waktu, adalah masalah yang paling signifikan, bukan pengalaman aktor individu atau keberadaan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian strukturasi menurut Giddens adalah "*Rules and resources drawn upon in the production and reproduction of social acts are at the same time the means of system reproduction (the duality of structure)*" (Giddens, 2009).

Landasan teori struktural adalah gagasan bahwa dualisme ini perlu dipikirkan kembali sebagai dualisme yang berlandaskan struktural daripada gagasan hermeneutika atau sosiologi interpretatif. Selain itu, "struktur" didefinisikan dalam teori strukturasi sebagai "aturan dan sumber daya yang secara rekursif terlibat dalam reproduksi sosial, karakteristik sistem sosial yang dilembagakan yang memiliki sifat struktural dalam hubungan yang diperkuat setiap saat dan di semua bidang." Struktur dapat dilihat dari dua jenis aturan, yaitu komponen normatif dan kode signifikansi.

Giddens menguraikan ide sentral dari teori strukturasi, yang membagi fungsionalisme (termasuk teori sistem) dan strukturalisme masing-masing melalui hermeneutika dan sosiologi interpretatif. Terlepas dari kenyataan bahwa fungsionalisme dan strukturalisme pada dasarnya bertentangan satu sama lain, perlu diingat kesamaannya. Comte, yang memperkenalkan prinsip-prinsip biologis sebagai kerangka kerja untuk memahami struktur dan operasi sistem sosial dan analisis proses evolusi melalui mekanisme adaptasi, dikreditkan dengan cara mengembangkan pemikiran fungsionalis. Sebaliknya, filosofi strukturalis Levi Strauss menolak evolusi dan tidak membuat asumsi biologis.

Dalam analisa strukturasi Vincent Mosco (2009), Mosco memperbarui argumen

Giddens dengan menambahkan analisa kelas dalam melihat bagaimana gerakan bekerja. Berbeda dengan Giddens yang melihat kekuasaan dilihat dari konsolidasi struktur berdasarkan individu yang dekat dengan aktor kekuasaan (power), Mosco justru melihat potensi yang tumbuh dari relasi sosial setiap aktor berdasarkan identitas yang mereka miliki. Baik itu kelas sosial, gender, maupun ras. Dalam konteks media sosial, Mosco melihat peran pekerja pengetahuan dalam upaya membantu masyarakat melihat realita yang tersebar di dunia maya dan membuka selubung hegemoni kelas dominan. Konsolidasi dari buruh pengetahuan membantu resistensi bagi gerakan sosial. Dalam hal ini, Mosco menaruh harapan besar terhadap buruh pengetahuan tersebut (Vincent Mosco & Katherin McKercher, 2008).

Gagasan tentang struktur, sistem, dan dualitas struktural merupakan inti dari teori strukturasi. Tentu saja, selain konsep fungsi, konsep struktur juga tak kalah pentingnya. Ide-ide semacam itu terkait dengan dualisme antara objek sosial dan subjek. Struktur dipandang sebagai "eksternal" dari tindakan manusia dengan cara ini. Dalam situasi ini, struktur sering dilihat sebagai titik pembeda antara kehadiran dan ketidakhadiran, bukan sebagai pencipta pola keberadaan seseorang. Penting untuk menyimpulkan kode fundamental dari manifestasi intrinsik. Gagasan inti di balik teori strukturasi adalah dualitas struktur, di mana interaksi sosial selalu terpecah menjadi sebab dan akibat. Kita harus dapat memahami bagaimana pendekatan saat ini dapat diterapkan pada praktik yang dilembagakan. Dengan analisis, kami dapat mendefinisikan konsep dan juga memeriksa perilaku strategis penelitian sehubungan dengan dualitas struktur. Selain itu, memeriksa tindakan aktor yang diposisikan secara strategis saat ini mengharuskan kita mengevaluasi hubungan antara konteks tindakan regional dan bentuk yang lebih besar, mencari konvergensi tindakan dan sejauh mana mereka mereplikasi praktik.

## **B. PSBB dan Efektifitas Menekan Laju Covid19**

Kemampuan pemerintah untuk merespon krisis dengan cepat, efektif, dan tangguh dikritik selama masa darurat Covid-19. Keyakinan publik terhadap kemampuan pemerintah menangani krisis dan bekerja

dengan baik di bawah tekanan berada dalam bahaya. Para pejabat legislatif, partai politik, pengamat, peneliti, selebriti, kelompok, dan pengguna internet semuanya menyuarakan kritik. Selly Gantina, anggota DPR Komisi VIII Fraksi PDIP, melakukan kritikan dengan mengatakan protokol komunikasi pemerintah perlu diperbaiki karena informasi dan komunikasi terkadang menimbulkan ketakutan publik. Sependapat dengan itu, juru bicara PSI Dara Nasution menyatakan bahwa informasi publik biasanya kurang terukur dalam komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Pengamat politik Hendri Satrio mengkritik pemerintah yang memiliki strategi yang tidak jelas dalam menangani COVID-19. Dia mengakui bahwa pemerintah memang memiliki tujuan yang berani untuk pertumbuhan, tetapi tidak mengantisipasi pandemi. Dua bulan dihabiskan untuk membuat cerita fiktif yang menghibur daripada membuat skenario pencegahan untuk menghentikan Covid-19 masuk ke Indonesia. Menurut Hermin Indah Wahyuni, pakar komunikasi UGM, sistem komunikasi publik pemerintah terkait COVID-19 masih belum efektif dan tumpang tindih sehingga menyebabkan pemerintah kehilangan fokus pada informasi terpenting yang harus dibagikan kepada publik. Kuskridho Ambardi, akademisi UGM lainnya, menegaskan pemerintah terhambat oleh koordinasi yang tidak jelas, ketegasan distribusi data, dan kurangnya informasi penanganan korban. Keduanya menyoroti bahwa jika pemerintah gagal mengadopsi strategi komunikasi publik yang efektif dan terkoordinasi saat krisis sedang berlangsung, hal itu berisiko meningkatkan ketidakpastian (UGM Fisipol, 2020).

Banyaknya kritik dalam penanganan covid19 mau tidak mau membuat pemerintah berbenah. Tidak sedikit beberapa kebijakan kemudian dilakukan secara hati-hati. Apalagi aturan yang dibuat memiliki dampak yang besar. Terutama masalah ekonomi lantaran virus ini membuat aktivitas masyarakat serba dibatasi. Sementara adanya pembatasan tersebut berimplikasi terhadap aktivitas ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi anjlok yang berdampak menurunnya daya beli masyarakat lantaran uang tidak bergerak secara normal. Di tengah penambahan kasus covid yang terus meningkat dan desakan lockdown atau penguncian aktivitas masyarakat, pemerintah mengambil kebijakan jalan

tengah. Namanya PSBB, yakni masyarakat masih bisa beraktivitas namun dibatasi. Seperti kebijakan work from home (wfh), penggunaan masker jika keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, hingga berpergian harus membawa surat bebas Covid19 dengan menunjukkan hasil swab ataupun rapid test.

Sayangnya kebijakan PSBB yang sudah berjalan berbulan-bulan tidak berdampak kepada menurunnya jumlah kasus positif. Yang terjadi adanya lonjakan kasus yang terus bertambah. Mulai dari kasus harian di bawah 1.000 hingga melonjak melebihi 10 ribu. Kasus tersebut tentunya membuat kita bertanya, apakah aturan yang dibuat memang benar sudah berjalan efektif. Atau sebaliknya, hanya namanya saja tetapi tidak ada penerapan yang maksimal. Tidak tegasnya sanksi yang diberikan sampai adanya pelanggaran yang dilakukan pembuat kebijakan tersebut membuat kita bertanya-tanya, sejauh mana pemerintah serius dalam menerapkan aturan main tersebut. Selain tentunya faktor-faktor lainnya membuat tidak semua masyarakat taat kepada kebijakan pemerintah.

Selain itu, kasus COVID ini sudah berlangsung sekitar satu tahun, termasuk beberapa hari libur. seperti Idul Fitri Dimana orang Indonesia pergi untuk perayaan Idul Fitri sangat dipengaruhi oleh pertimbangan agama dan kebiasaan yang mengikutinya. Terapkan praktik pergi berbelanja dan kemudian pulang sebelum Idul Fitri. Tergantung pada agama yang dominan di setiap provinsi, gerakan ini bisa berubah. PSBB yang diterapkan di beberapa provinsi tidak banyak berpengaruh pada kebiasaan masyarakat. Namun, pencabutan PSBB dan pelonggarannya, seperti PSBB Transisi Jakarta, tidak serta merta membuat pergerakan masyarakat kembali normal. Semua kategori melihat perbedaan secara bertahap kembali ke garis dasar.

Jumlah lonjakan meningkat secara dramatis karena semakin banyak orang yang terbiasa dengan virus Wuhan. Bahkan baru-baru ini, ada 10.000 kasus yang dilaporkan. Untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang keras di Pulau Jawa dan Bali selama dua minggu mulai 11-25 Januari. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 memuat keputusan penerapan PSBB Jawa-Bali.

Keputusan untuk mengadopsi kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap peningkatan rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU yang meningkat menjadi 70%, dan rasio positif yang saat ini mencapai 14,2%. Selain DKI Jakarta dan kawasan Bodetabek, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi, Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya Jawa Tengah semuanya akan menerapkan PSBB. Wilayah Jogja terdiri dari Kabupaten Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo. Malang Raya dan Surabaya Raya termasuk untuk Jawa Timur. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menjadi lokasi terakhir di Bali. Pemerintah mengadopsi sejumlah inisiatif strategis di bawah undang-undang baru ini, termasuk kemampuan bagi 75% karyawan untuk bekerja dari jarak jauh.

Pemerintah juga membuat keputusan tentang pembelajaran jarak jauh, membatasi jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB, dan membatasi jumlah jamaah yang diperbolehkan berada di rumah ibadah sebesar 50%. Juga, itu akan menghentikan sementara acara sosial budaya, menutup gedung-gedung publik, dan secara ketat membatasi jam operasional semua jenis transportasi.

Sayangnya, kebijakan yang sudah hampir berakhir tersebut belum memiliki dampak yang signifikan. Sebaliknya, angkanya malah tambah parah dengan lonjakan yang terus meningkat. Hal itu bisa terlihat dari provinsi yang menerapkan PSBB Jawa Bali. Data 19 Januari 2021 menunjukkan provinsi dengan sumbangan terbanyak, hanya Banten yang tidak masuk dalam lima besar provinsi yang angka lonjakannya tertinggi. Padahal PSBB dengan pengetatan telah diberlakukan.



**Gambar 1.** Perkembangan Kasus Positif Covid-19 Mingguan  
Sumber: Detik.com (19 Januari 2021)

Jika melihat data tersebut bagaimana, angka Covid19 di DKI Jakarta tidak pernah bergeser dari tiga besar sejak kasus ini pertama kali mengemuka. Padahal ibukota tersebut merupakan daerah pertama yang memberlakukan PSBB pada Maret 2020. Selain tentunya menjadi pusat pemerintahan dan bisnis yang harus menjadi acuan bagaimana kebijakan pemerintah bisa dijalankan dengan baik. Sayangnya hal itu tidak bergaris lurus sama penurunan kasus. Hal ini bisa menjadi indikasi kalau penerapan sejumlah aturan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam menekan laju penyebaran covid19. Harusnya itu menjadi pukulan pemerintah karena kebijakannya tidak begitu berdampak. Walaupun sempat ada penurunan kasus, namun jumlahnya tidak begitu besar. Sejumlah penyebab dituding kenapa penyebaran Covid19 di DKI tinggi, diantaranya karena masyarakat semakin abai terhadap protokol kesehatan. Pemerintah juga tidak menginden-tifikasi kasus baru dengan baik karena berpedoman dengan peraturan Kementerian Kesehatan yang baru.

Sesuai aturan penanganan Covid-19 Kemenkes yang diperbarui, pemerintah tidak diwajibkan untuk melakukan pelacakan atau contact tracing terhadap individu yang tidak menunjukkan gejala. OTG berpotensi menyebar ke orang lain sebagai akibatnya. Menurut ahli epidemiologi dan spesialis wabah Pandu Riono dari Universitas Indonesia, saat ini sangat sulit untuk mengurangi kasus penularan virus di ibu kota negara. Bisa dibayangkan untuk melanjutkan kelambatan transmisi ini selama mungkin saat ini. Desakan untuk tidak naik sudah cukup kuat di Jakarta.

Dia mengklaim karena pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan, sulit untuk menghentikan penyebaran epidemi di ibu kota. Pemerintah DKI terpaksa mengizinkan perkantoran tetap beroperasi dengan kapasitas 25% untuk yang tidak penting selama PSBB ketat ini. tetapi hanya 50% dari yang diperlukan yang diizinkan. "Tidak semua tempat kerja pasti mengikuti aturan. Sulit bagi Jakarta untuk mengurangi kasus karena masalah kebijakan ini. Sama halnya dengan Jakarta, daerah terdekat lainnya tidak dapat mematuhi batasan tersebut" jelasnya.

### C. Struktur, Agensi, Sebuah Perlawanan

Kasus covid19 yang tak kunjung reda rupanya membuat masyarakat jenuh. Kondisi

itu jelas berimbas kepada kepatuhan masyarakat kepada aturan pemerintah. Tak heran, suasana hari ini kondisinya tidak seperti ada pandemi. Jalan-jalan masih ramai, ruang-ruang publik dipenuhi warga, dan lain sebagainya. Hal itu bisa jadi sikap masyarakat dan semacam 'perlawanan' dari segenap kebijakan pemerintah. Jika kita menghubungkan teori strukturasi ada relasi bagaimana agen dan struktur itu berkoneksi. Meskipun tidak semua struktur itu ditaati oleh agen. Struktur mempengaruhi agensi dalam dua arti: memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*).

Menurut Giddens, agensi dapat menyimpang dari struktur dan tidak selalu dibatasi olehnya. Dia memiliki opsi untuk mencari cara untuk menghindari hukum dan peraturan saat ini. Dialektika kontrol adalah nama yang diberikan untuk skenario ini. Struktur dapat diperangi oleh agensi melalui kontrol: "Semakin kaku dan erat hubungan formal kekuasaan di dalam sebuah organisasi, pada kenyataannya, semakin banyak peluang untuk menghindarinya" Jadi, istilah Giddens "praktik sosial" (berlawanan dengan struktur atau agen) berfungsi sebagai titik fokus teori strukturasi.

Jika melihat kasus PSBB terlihat bagaimana masyarakat 'melawan' kebijakan pemerintah yang dibuat. Pengabaian, tidak patuhnya aturan yang dijalankan, menjadi satu bukti kalau tidak semua aturan bisa dijalankan. Buktinya berbulan-bulan adanya PSBB tidak berkorelasi dengan grafik kasus covid yang menurun. Sebaliknya, malah adanya lonjakan-lonjakan. Ada perlawanan yang bergerak secara individu tanpa ada yang mengkoordinasi.

Giddens memisahkan aktor menjadi 3 (tiga) dimensi internal di antaranya: kesadaran diskursif, kesadaran praktis, dan motif tidak sadar (Priyono, 2002). Motif tak sadar adalah kebutuhan atau keinginan yang dapat mengarah pada perilaku tetapi tidak benar-benar menyebabkannya. Nah, relasi antara kebijakan dan kepatuhan bisa nampak pada ketidaktaatan masyarakat terhadap kebijakan. Walaupun sempat ada sikap taat, namun hanya sebentar. Misal kepedulian terhadap covid diawal saja, setelah itu masalah ini dianggap biasa. Makanya kita bisa melihat bagaimana kerumunan mudah ditemui. Apalagi sejak ada kelonggaran-kelonggaran yang dibuat pemerintah meskipun PSBB

belum dicabut. Akhirnya masyarakat menjadi abai dengan pembatasan yang ada. Aktivitas terlihat berjalan normal. Jalan-jalan mulai ramai, pusat perbelanjaan ramai, pun dengan tempat wisata yang menggeliat lagi, terutama saat libur panjang akhir tahun. Di tengah abainya masyarakat, lonjakan covid terus bertambah.

Masyarakat seakan terbiasa dengan covid 19. Awalnya virus tersebut dianggap sebagai momok, aib, sesuatu yang dihindari, kini seakan bukan hal yang mengerikan lagi. Pemberitaan-pemberitaan yang disiarkan dengan narasi yang seakan menakutkan juga tidak membuat ketakutan masyarakat. Disini terjadi perlawanan tanpa sadar oleh masyarakat. Misal dengan tetap menyelenggarakan pesta pernikahan meski dilarang. Bahkan kegiatan yang dihadiri banyak orang. Pun dengan ramainya pasar-pasar tradisional yang tidak kehilangan pembelinya. Mereka mengabaikan imbauan pemerintah, dengan banyak tidak menggunakan masker. Hal itu bisa jadi satu indikator kalau covid-19 bukan lagi menjadi momok yang menakutkan.

#### **D. Pola Komunikasi dan Informasi**

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lengga Pradipta menganalisis tiga hal kenapa penyebaran covid sulit bisa teratasi. yakni internal, eksternal, dan institusional. Ia menjelaskan, faktor pertama yaitu internal yang berasal dari masyarakat sendiri. Misalnya saja, di banyak daerah masih banyak masyarakat yang tidak mematahui anjuran untuk tidak beribadah secara berjamaah di tempat ibadah. "Di daerah-daerah yang agamanya kuat, mereka percaya bahwa kematian datangnya dari Tuhan. Jadi, Covid-19 adalah trigger saja, tapi yang punya kuasa itu Tuhan. Ini mengubah stigmanya agak sulit," katanya.

Faktor kedua adalah berkaitan dengan eksternal masyarakat yaitu banyaknya media yang tidak kredibel. Begitu banyak propaganda beredar di internet menyebabkan masyarakat merasa resah. Terutama informasi yang beredar di media sosial. "Di Google banyak media yang kredibilitasnya belum tentu, tapi sudah membuat berita tentang Covid-19. Kemudian, di sosial media, ada berita-berita yang menjelaskan Covid-19 itu justru bikin saya jadi takut," kata Lengga menjelaskan. Terakhir, yaitu faktor ketiga yang bersifat institusional. Ia menjelaskan,

dinamika pernyataan pemerintah yang dimuat di media. Pada Januari, di saat negara-negara lain mempersiapkan diri dengan Covid-19, narasi yang beredar di Indonesia adalah negara ini tidak akan mudah tertular.

Hal itu tergambar dari pola komunikasi yang terbangun ketika awal Covid ini merebak. Negara seperti tidak serius untuk menangani kasus ini. Seperti informasi yang sudah disematkan di situs resminya, untuk menyebarkan informasi akurat tentang COVID-19, pemerintah tidak membuat akun media sosial baru yang unik melalui Tim Gugus Tugas. Akun yang digunakan adalah profil resmi BNPB di Twitter, Instagram, dan Facebook. Setelah situs video-sharing YouTube dan aplikasi perpesanan pribadi WhatsApp yang masing-masing menempati posisi pertama dan kedua, ketiga akun ini menempati tiga besar situs jejaring sosial yang paling banyak diakses pengguna internet Indonesia. Menurut data dari situs rating media sosial We Are Social, masing-masing memiliki persentase penggunaan sebesar 82%, 79%, dan 56%.



**Gambar 2.** Tangkapan layar akun facebook BNPB, Mei 2020

Pemerintah sering membagikan konten yang sama sesuai dengan agenda penyebaran informasi tentang perkembangan terkini serta inisiatif proaktif, menurut pencarian yang dilakukan di tiga akun jejaring sosial. Pemerintah juga tampaknya berkontribusi pada penyalarsan distribusi konten dengan jenis platform yang digunakan. Misalnya, pemerintah memodifikasi tweetnya di Twitter agar sesuai dengan persyaratan platform untuk tweet singkat, beberapa gambar, dan bahkan tweet serial dengan tagar (hashtag) terlampir. Instagram, di sisi lain, mendukung pesan dengan visualisasi infografis yang mendetail dan mendidik sehingga mudah dibagikan kembali. Meskipun tagar berguna untuk mengkategorikan informasi dan mempermudah pencarian kata kunci, tagar yang disisipkan di setiap bagian konten

sayangnya tidak konsisten dan tampak kurang konseptual.

Tingkat timbal balik dan keterlibatan komunikasi digital yang diharapkan antara pemerintah dan netizen di setiap platform tampaknya masih belum maksimal. Bagian komentar, yang belum digunakan sebagai alat komunikasi dua arah, menunjukkan hal ini. Fungsi suka dan bagikan (termasuk suka, bagikan, dan retweet) tampaknya langka. Memang, pemerintah tidak memprioritaskan jumlah like, share, dan tweet yang sama dengan akun jejaring sosial komersial. Namun, ini bisa menjadi tanda ketidaktertarikan publik dan netizen terhadap data yang telah diposting pemerintah. Selain itu, karena tercampur dengan konten lain, data pemerintah yang diunggah ke akun jejaring sosial itu pun terdistorsi.

Menurut Kagia (2005), proses demokratisasi dan perkembangan teknologi mampu menjadi motor yang dominan dalam masyarakat yang 'mendukung' kebijakan 'pengentasan kemiskinan'. Dalam hal ini, reproduksi dan juga pengembangan sarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong bagaimana hegemoni diciptakan. Hegemoni, dalam pandangan Mosco bisa menjadi lebih berbahaya dibandingkan ideologi, mengingat hegemoni mengandalkan kesepakatan dan diterima oleh masyarakat tanpa perlu mempertanyakannya kembali.

Secara harfiah, hegemoni diambil dari Bahasa Yunani hegemonia yang berarti memimpin. Dalam konteks Marxisme, konsep hegemoni pertama kali diperkenalkan oleh Antonio Gramsci dalam bukunya, *Prison Notebooks*. Dalam buku tersebut, hegemoni dapat diartikan dalam dua arti. Di satu sisi, Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan bentuk dominasi dari relasi kelas dominan di masyarakat (baik dalam bentuk Negara, maupun dalam bentuk borjuasi), sedangkan di sisi lain, Gramsci bisa menunjuk tangan langsung bahwa hegemoni merupakan bagian dari upaya korporatisme (Gramsci, 1999, p. 20). Gramsci menegaskan bahwa proses hegemoni dapat merujuk pada dua elemen, yakni elemen individu dan elemen koersif Negara. Dalam hal ini, kedua elemen tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Individu sebagai kelas dominan berfungsi untuk mereproduksi 'konsensus' kepada massa dalam jumlah besar secara spontan, sedangkan aparatus koersif Negara berfungsi

sebagai 'pendisiplin' apabila 'konsensus' tersebut gagal tersampaikan (Gramsci, p. 145).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kasus Covid19 yang belum mereda harusnya menjadi kewaspadaan kita bersama. Sayangnya tidak semuanya individu memiliki rasa yang sama terhadap pandemi ini. Pengabaian, larangan, aturan yang dibuat pemerintah masih saja tidak ditaati. Hal itu menjadi bukti kalau kesamaan kolektif tidak terbangun dalam melihat pandemi. Sayangnya, ketika kesamaan kolektif belum ada, pemerintah sebagai penerima mandat kuasa, seolah tidak berdaya dengan fenomena yang sudah berlangsung setahun terakhir.

Sejumlah kebijakan memang sudah dibuat sejak awal pandemi. Seperti PSBB yang telah diberlakukan hampir 10 bulan lalu. Sayangnya, kebijakan itu tidak berhasil karena kasus positif kian bertambah dengan lonjakan besar terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Ini menjadi warning bagi kita semua. PSBB sebagai kebijakan yang diharapkan bisa mengerem lonjakan kasus tidak berdaya lantaran banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Kasus di DKI Jakarta bisa menjadi gambaran implementasi PSBB. Dimana daerah tersebut kali pertama menerapkan aturan itu, namun angkanya penularannya paling tinggi. Bahkan selalu menempati ranking pertama tiap harinya.

Kenapa itu bisa terjadi, karena sejumlah hal. Misal, kejenuhan masyarakat, tidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan PSBB, hingga pola komunikasi yang dibangun pemerintah belum sepenuhnya baik. Jika merujuk pada aturan strukturasi tergambar bagaimana agen dan struktur tidak segaris lurus. Artinya agen tidak sepenuhnya tunduk pada struktur.

Dalam kasus PSBB tergambar bagaimana agen melawan struktur. Itu bisa terjadi karena banyaknya faktor dari kebijakan yang berubah-ubah, faktor ekonomi, relasi kuasa antar struktur yang tak jalan dan lain sebagainya. Masih tergambar tidak sinkronnya aturan pemerintah pusat dan daerah juga bisa berimbas kebijakan tersebut. Seperti hubungan antar pusat dan DKI Jakarta yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Terutama menyikapi kebijakan persoalan transportasi. Maka itu, pemerintah harus konsekuen dalam

menerapkan aturan. Seperti tidak hanya membuat kebijakan namun lemah penerapannya. Jika itu masih dilakukan jangan berharap setiap aturan dalam berjalan dengan baik. Perlu adanya kekonsistenan dalam setiap mengawal sebuah aturan

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Penerapan PSBB di Masa Covid-19 dalam Perspektif Strukturasi.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ashaf, Firman Abdul; Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. *Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung*, Volume 8, Juli 2006.
- CNN Indonesia.com 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210107062118-20-590454/dua-pekan-pemerintah-terapkan-psbb-jawa-bali>.
- Coombs, W.T. "Code Red in the Boardroom: Crisis Management as Organization DNA. Westport, CN, 2006
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Detik.com. 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5340410/grafik-corona-mingguan-di-ri-kasus-positif-kematian-meningkat-drastis?>
- Giddens, Anthony. 2009. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Jin, Y & Liu, B. F. "The Blog-mediated Crisis Communication Model: Recommendations for Responding to influential external Blogs" *Journal of Public Relations Research*, 2010.
- Jin, Y., Pang, A., & Cameron, G, T. "Strategic Communication in Crisis Governance: Analysis of The Singapore Management of the SARS Crisis". *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, 2006.

- Kantor Staf Presiden (KSP). "Protokol Komunikasi Publik Penanganan Covid-19"[online]<http://ksp.go.id/wpcontent/uploads/2020/03/ProtokolKomunikasi-COVID-19.pdf>, 2020.
- Kompas.co.2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/17414991/kasus-harian-covid-19-tembus-14-ribu-satgas-tak-bisa-ditoleransi>.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication*. London: Sage Publication. Ltd.
- Republika.co.id. 2020. <https://republika.co.id/berita/qadh90409/tiga-penyebab-indonesia-sulit-atasi-pandemi-covid19>.
- Ritzer, George and Douglas J Goodman. 2008. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Tempo.co. 2020. <https://metro.tempo.co/read/1417608/epidemiolog-ungkap-2-penyebab-kasus-covid-19-melonjak-tinggi-di-jakarta/full&view=ok>
- Tempo.Co.2020.<https://metro.tempo.co/read/1392581/epidemiolog-sebut-sulit-redam-penularan-covid-19-di-dki-jakarta-kenapa>.
- Tirto.co. 2020. <https://tirto.id/pola-pergerakan-masyarakat-psbb-yang-tak-jelas-arah-f5Z1>.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3, 2020.
- \_\_\_\_\_. "Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding" 2nd ed. ThousandOaks, CA: Sage, 2007
- \_\_\_\_\_. "Crisis Communication and Social Media" [Online]. Institute for PublicRelations.[http://www.instituteforpr.org/essential\\_knowledge/detail/crisis\\_communication\\_and\\_social\\_media/](http://www.instituteforpr.org/essential_knowledge/detail/crisis_communication_and_social_media/) diakses 20 April 2020.